



**Kampung Sayur** Wiltra, Gondokusuman, yang asri dan berhasil membudidayakan berbagai sayur dan buah. Masyarakat setempat memiliki hasil panen menjadi makanan dan minuman juga konsumsi.

## Mandiri Pangan Kuatkan Pariwisata Jogja

**K**ampung sayur di Jogja kian tahun kian bertambah. Program ketahanan pangan di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Jogja ini dimulai pada 2018 silam. Pada tahun pertama, ada 79 kampung sayur. Seiring tahun, jumlahnya bertambah. Pada 2019 ada 93, kemudian meningkat menjadi 111 pada 2020. Pada masa pandemi Covid-19, Pemkot Jogja kembali menggenjot jumlah kampung sayur sebagai solusi ketahanan pangan di tengah krisis kesehatan yang melanda. Tercatat ada 115 kampung sayur pada 2021, kemudian meningkat menjadi 119 pada 2022, dan meningkat lagi menjadi 124 pada 2023. Tak hanya berlandaskan pada kuantitas, Pemkot Jogja juga mengutamakan kualitas kampung sayur. Situasi ini agar pengurus kampung sayur memiliki keterampilan perawatannya. Proses dari pemilihan, perawatan, hingga pengolahan hasil panen dilatih oleh DPP Jogja. Kepala DPP Kota Jogja, Suyana, menjelaskan kampung sayur menjadi salah satu inovasi ketahanan pangan di Jogja yang berhasil. "Saat Pandemi Covid-19, kampung sayur menjadi penunjang utama bahan pangan warga, saat ini juga terus berkembang, tidak hanya menjadi bahan pangan, tetapi akhirnya bahkan ke pariwisata," katanya. Perkembangan kampung sayur dalam menunjang pariwisata Kota Jogja, menurut Suyana, adalah suatu ketahanan karena sektor itu menjadi andalan yang terdampak pandemi. "Kampung sayur ini adaptif dengan perkembangan Jogja. Saat dibutuhkan ketika pandemi, kampung sayur bisa respon. Saat kebutuhan normal, kampung sayur bisa menguatkan pariwisata karena mulai banyak kampung sayur yang menjadi destinasi wisata sekaligus," katanya. Kelelasan kampung sayur yang tumbuh menjadi kampung wisata, menurut Suyana, lantaran pertanian perkotaan juga punya daya tarik tersendiri yang cukup menjanjikan. "Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata agar bersama-sama mengaktifkan daya tarik wisata kampung sayur dengan pertanian perkotaannya," katanya. Suyana merekomendasikan kampung sayur yang sudah tumbuh menjadi kampung wisata adalah Bausaran dan Klaten. "Di sana cukup bagus pengelolaannya pertaniannya, cukup mapan sistemnya, sehingga mau tidak mau harus bertumbuh lagi, tidak bisa berhenti hanya di pertanian... Para pengunyahnya sendiri yang mengembangkannya jadi kampung wisata dan ini positif dipaparkan dan didukung bersama," ujarnya.

**Pertanian Perkotaan**  
Kepala Bidang Pertanian DPP Kota Jogja, Ery Sulistyawati, menjelaskan kampung sayur yang menjadi kampung wisata tidak meninggalkan konsep pertanian perkotaan yang sudah dibangun. "Warga kampung sayur masih rajin menanam, bahkan sudah berhasil menghasilkan benihnya sendiri. Kami sudah mencapai puncak target, mereka bertinovasi ke pariwisata karena itu juga menambah nilai untuk meningkatkan kesejahteraan warganya," katanya. Ery menyebut pelajarannya memiliki 15 petaje petaluh lapangan (PPL) pertanian di tiap kecamatan. "PPL ini masih rutin membantu dan membina mereka juga, setidaknya seminggu dua kali mereka membuat kegiatan bersama, termasuk yang sudah jadi kampung wisata," tuturnya. Bahkan, selain mendorong menjadi kampung wisata, DPP Kota Jogja juga mendorong agar ada pengolahan bahan pangan hasil panen kampung sayur. "Hasil olahannya beragam, ada minuman, aneka kue, dan lainnya semuanya hasil panen sendiri," katanya. DPP Kota Jogja, menurut Ery, turut memfasilitasi pengolahan hasil panen tersebut. "Misalnya kami dampingi mengolah sertifikat hotel, izin penjualan, dan lainnya. Dengan demikian kampung sayur yang menjadi kampung wisata punya produk khas yang bisa dijual ke wisatawan dan pasar luas," katanya. 19

**Harapan Harapan di Usia 267**

Penduduk Kota Jogja mengantisipasi banyak harapan soal usia warga yang mereka tempati mencapai 267 tahun.

Jogja sejak dulu dikenal sebagai kota budaya di samping kota pelajar, maka saya berharap agar nilai-nilai budayanya ini dapat terus dilestarikan dalam taktik dan programnya. Bagaimana cara pemangku mampu memertahkannya adalah kota kita ini.

**Joko Santosa**  
Warga Kelurahan Muga-muga, Umbulharjo.

Saya yakin Pemkot Jogja bisa mewujudkan pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Sampah tidak hanya dibuang tetapi dimanfaatkan nilai tambahnya. Ini bisa mendukung UMKK.

**Sugihartono**  
Warga Kelurahan Baciro, Gondokusuman.

Semoga pengelolaan sampah bisa terus lebih baik agar tidak berdampak ke banyak sektor, terutama pariwisata.

**Suwardo**  
Warga Kelurahan Gwangan, Gwangan.

## Penataan Permukiman Menjadi Prioritas

**P**emerintah Kota Jogja menata permukiman kumuh di wilayahnya melalui program Musdar, Musbang, Musbang Kaki (MSK). Konsep ini dilakukan dengan memulihkan minimal tiga meter rumah kumuh atau tidak berada di sempadan sungai yang digunakan untuk akses mitigasi, perlintasan terhadap bahaya longsor, jalan inspeksi dan infrastruktur sanitasi. Menggubai atau naik melaki konsep rumah susun dan musbang atau penghadapan sungai.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKP) Kota Jogja, Sigit Setiawan menjelaskan program MSK sudah dilaksanakan sejak 2015. Fokusnya dengan memugar kawasan kumuh yang sebagian besar terdapat di bantaran sungai. Sampai 2022, ada 89,36 hektare permukiman kumuh di Kota Jogja, dan 77,78 hektare (87,1%) berada di bantaran sungai, sementara 11,58 hektare (12,8%) di luar bantaran sungai.

"Untuk penataan di bantaran sungai kami menggar rumah agar mudah tiga meter dari bantaran sungai, kemudian ruang yang ada dibagikan jalan dan sarana prasarana permukiman pelengkap seperti IPL, komunal, jaringan listrik, dan sebagainya," kata Sigit.

Fokus dalam penataan MSK disesuaikan dengan tajuk indikator kawasan kumuh yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan dan proteksi kebakaran. Upaya ini dipilih lantaran Kota Jogja tidak punya tempat relokasi yang cukup guna memangkas warga jika dilakukan program relokasi. "Karena luas tanah berkurang, maka pemerintah juga punya kewajiban melaksanakan kawasan ruang-lingkungan yang tidak cukup kami buat dua lantai karena satu orang secara spare areaannya 1,2 meter persegi, jadi kalau empat orang, luasnya sekitar 30 meter persegi," kata Sigit.

Dia mengakui bahwa tidak semua permukiman kumuh di bantaran sungai bisa dipugar dengan cara MSK. Lantaran luas tanah di beberapa wilayah cukup

sempit, sehingga langkah yang dipilih adalah konsep penataan. Dalam hal ini, DKP/KP Kota Jogja mengkonsolidasikan tanah milik warga atau menata ulang dan bangunan rumah dibuat dua lantai.

Pada penataan permukiman, program yang dipilih dan masih sejalan dengan MSK adalah MAHIANANNI (Perumahan dan Permukiman Layak HaND) menuju kampung mandiri. Pada program ini DKP/KP fokus dalam memuntaskan seluruh indikator kumuh, kemudian memunculkan faktor risiko longsor demi mewujudkan permukiman layak huni. Partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek penataan berperan penting dalam program ini.

Program ini karni coba di dua lokasi yakni Perumahan RW3 dan Terban RW1. Di Terban baru telah penataan pada 2023 bisa didanai dengan DAK dan APBD. Kalau Pringgokusuman sudah dimulai tahun ini dengan APBD Kota Jogja, dan kami baru menata sekitar tujuh bidang tanah," ujarnya.

Menurut Sigit, salah satu fokus dalam penataan kawasan kumuh adalah penyediaan sanitasi dan pengolahan limbah. Ini penting lantaran sebelum dilata, warga di bantaran sungai masih membuang limbah domestik rumah tangga langsung ke sungai atau diolah. Media pucukan, mereka membuat IPL komunal sosial dengan rumah MSK, sehingga limbah bisa diolah dulu sebelum dibuang ke sungai.

Sampai saat ini terapan permukiman yang sudah diarahkan dengan program ini ada 501 rumah dari total rumah di permukiman kumuh sebanyak 1.200 rumah. Sigit mengakui bahwa tantangan dalam mengurugi kawasan permukiman kumuh masih banyak, tetapi Sigit optimis pengurangan kawasan kumuh di Jogja berjalan sesuai target. "Yang kami uruti pengurangan kawasan kumuh mencapai tiga hektare per tahun. Pelebaran masyarakat selah kami lakukan mulai dari perencanaan. Warga sudah diajak beresuk kemulian dalam perencanaan rumah mereka juga diajak koordinasi," katanya. 20

**Sungai Code**

Program ini karni coba di dua lokasi yakni Perumahan RW3 dan Terban RW1. Di Terban baru telah penataan pada 2023 bisa didanai dengan DAK dan APBD. Kalau Pringgokusuman sudah dimulai tahun ini dengan APBD Kota Jogja, dan kami baru menata sekitar tujuh bidang tanah," ujarnya.



Saya yakin Pemkot Jogja bisa mewujudkan pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Sampah tidak hanya dibuang tetapi dimanfaatkan nilai tambahnya. Ini bisa mendukung UMKK.

**Sugihartono**  
Warga Kelurahan Baciro, Gondokusuman.

Semoga pengelolaan sampah bisa terus lebih baik agar tidak berdampak ke banyak sektor, terutama pariwisata.

**Suwardo**  
Warga Kelurahan Gwangan, Gwangan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005